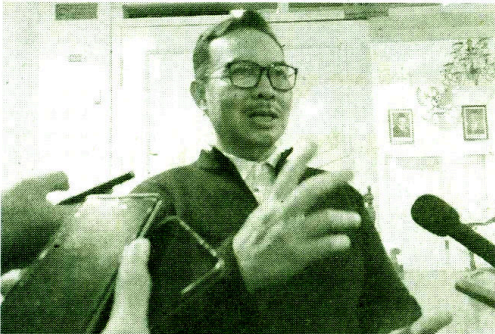




KEBUT PROGRAM GEROBAK SAMPAH

Wali Kota: Baru 15 Kelurahan yang Siap



MERAPI-WAHYU TURIK

Hasto Wardoyo

YOGYA (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta akan memberlakukan kebijakan gerobak sampah atau transporter di masing-masing RW untuk memudahkan pengendalian depo-depo. Namun, belum semua RW siap untuk menerapkan kebijakan ini.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, baru 15 kelurahan atau sekitar 30 persen yang siap menerapkan kebijakan transporter. Menurut Hasto, kebijakan ini diatur langsung oleh se-

tiap kelurahan. Seperti mencari penggerobak, mengatur teknisnya, hingga mengatur soal retribusi bagi penggerobak.

"Saya akan pantau misalnya hari ini itu dari 45 kelurahan itu yang sudah hijau, hijau itu ya artinya masalah penggerobaknya sudah selesai, RW nya mengatur dengan baik, sudah tidak ada konflik lagi, hari ini yang hijau dari 45 itu sekitar 15," kata Hasto, Senin (17/3) malam.

Hasto mengungkapkan, di Kota Yogyakarta ada 600 RW lebih yang diharapkan

bisa menyelesaikan problematika transporter. Transporter bertugas membawa sampah dari rumah penduduk ke depo. Problematika transporter ini menjadi tanggung jawab dari lurah yang dibantu oleh masing-masing RW yang ada di bawahnya secara gotong royong.

"Lurah yang saya pantau, lurah harus bisa menyelesaikan itu, wong lurah kok masa nggak bisa. Saya pantau penggerobak awal baru 600, tumbuh jadi 700, per hari ini sudah 1.017. Artinya, dulu RW cari penggerobak susah tidak ada yang mau jadi penggerobak," terangnya.

Hasto menegaskan, Pemkot Yogyakarta tidak menentukan tarif atau retribusi setiap warga dengan kebijakan transporter ini. Ketentuan retribusi tersebut merupakan hasil musyawarah dari setiap RW yang disepakati bersama.

"Karena setelah digotongroyongkan warga dan RW ini akhirnya sepakat, oh harus ada iuran untuk penggerobak. Saya nggak menentukan, silakan warga dan

RW saja, ya yang pantas lah. Kalau untuk yang kurang mampu ya saya harapkan nggak usah ditarik retribusi," ujarnya.

Pihaknya pun akan memonitor kesiapan kalurahan setiap pekan. Rapor tiap kelurahan akan ditampilkan pada rapat mingguan yang digelar setiap hari Selasa. "Target 100 hari kerja seluruh kelurahan sudah hijau. Sekarang sudah saya sosialisasikan terus supaya warga jangan membuang sampah langsung ke depo, harus pakai penggerobak," sambungnya.

Selain itu, faktor lain juga akan dipantau setiap pekan. Misalnya ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta memantau masalah sampah ini hingga titik-titik pembuangan sampah liar. "Sampah liar hari ini berkurangnya sekitar 30-35 persen, di Kali Mambu sudah tidak banyak, di Gembira Loka tadi saya cek juga sudah tidak lagi buat buang, soalnya saya taruh posko di sana. Dinas saya pantau membawa sampahnya dari depo itu setiap

Selasa sore saya minta laporan, dipresentasikan berapa ton, titik mana saja," urainya.

Hasto menambahkan, satu masalah yang terus ia kebut untuk memulai kebijakan ini yaitu ketersediaan gerobak. Sampai saat ini pun pihaknya masih menci-cil pengadaan gerobak. Di sisi lain, Hasto juga akan menggunakan anggaran pengadaan mobil dinas baru serta perabot rumah dinas untuk pengadaan gerobak. Seperti diketahui, Hasto telah menolak pengadaan mobil dinas baru dan perabot rumah dinas.

"Saya baru mempelajari kalau anggaran untuk beli mobil, mebel, itu kalau untuk buat gerobak harus pakai (anggaran) perubahan atau cukup dari saya. Tapi kan proses bisa mulai sekarang, kita kekurangan sekitar 600 gerobak. Ini sambil jalan saya cicil sekarang, walaupun belum ada anggaran kan ada CSR-CSR. Kalau ada uang sisa mau saya belikan APD, sepatu, topi, sama sarung tangan untuk transporter," ujarnya.

(C-12)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005